

**EVALUASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH
KOTA BATAM MELALUI PROGRAM BANK SAMPAH
BATAM**

SKRIPSI



Oleh:

**Wiwiek Armayana
191010046**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2023**

**EVALUASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH
KOTA BATAM MELALUI PROGRAM BANK SAMPAH
BATAM**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana**



Oleh:

**Wiwiek Armayana
191010046**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2023**

SURAT PERNYATAAN ORSINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Wiwiek Armayana
NPM : 191010046
Fakultas : Ilmu Sosial dan Humaniora
Program studi : Administrasi Negara

Menyatakan bahwa “Skripsi” yang saya buat dengan judul:

Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Kota Batam Melalui Program Bank Sampah Batam.

Adalah hasil karya sendiri dan bukan “duplikasi” dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, didalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip didalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia naskah skripsi ini digugurkan dan skripsi yang saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Batam, 27 Januari 2023



Wiwiek Armayana
191010046

**EVALUASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH KOTA
BATAM MELALUI PROGRAM BANK SAMPAH BATAM**

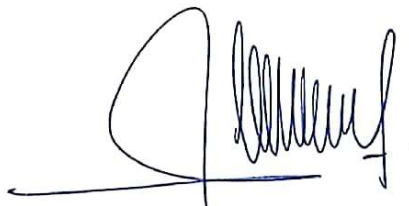
SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Salah satu Syarat
Memenuhi Gelar Sarjana**

**Oleh
Wiwiek Armayana
191010046**

**Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal
seperti tertera di bawah ini**

Batam, 27 Januari 2023

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized initial 'L' followed by a series of loops and a final flourish.

**Lubna Salsabila, S.IP., M.I.P., MPA.
Pembimbing**

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Kota Batam Melalui Program Bank Sampah Batam. Upaya strategis yang dilakukan Pemerintah Kota Batam dalam mengatasi permasalahan sampah kota Batam adalah dengan mengajak masyarakat untuk mengurangi jumlah sampah dari sumbernya melalui program Bank Sampah. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian menggunakan kriteria penilaian yang ditawarkan oleh William N. Dunn yang meliputi 6 poin penilaian yaitu (a) efektivitas; (b) efisiensi; (c) kecukupan; (d) responsivitas; (e) pemerataan; dan (f) ketepatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, (1) jalannya pengelolaan sampah Kota Batam melalui program Bank Sampah tergolong baik; dan (2) walaupun secara keseluruhan program dapat dikatakan baik, namun hasil yang diharapkan belum tercapai secara keseluruhan.

Kata Kunci: Evaluasi, Pengelolaan Sampah, dan Bank Sampah

ABSTRACT

The purpose of this research is to find out how the Batam City Waste Management Policy Evaluation process is conducted through the Batam Garbage Bank Program. The strategic effort made by the Batam City Government in overcoming the Batam city waste problem is by inviting the public to reduce the amount of waste from the source through the Garbage Bank program. This study uses a qualitative approach with a descriptive research type, while the data collection techniques used are observation, interviews, and documentation. The study uses the assessment criteria offered by William N. Dunn which includes 6 assessment points, namely (a) effectiveness; (b) efficiency; (c) adequacy; (d) responsiveness; (e) alignment; and (f) accuracy. The results of the study show that (1) the process of waste management in Batam City through the Garbage Bank program is relatively good; and (2) although overall the program can be said to be good, the expected results have not been achieved in its entirety.

Keywords: *Evaluation, Waste Management, and Waste Bank*

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr. wb puji syukur atas limpahan rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada Program Studi Administrasi Negara Universitas Putera Batam.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Karena itu, kritik dan saran akan senantiasa penulis terima dengan senang hati. Dengan segala keterbatasan, penulis menyadari pula bahwa Skripsi ini akan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, Dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Nur Elfi Husda, S.Kom., M.SI. Selaku Rektor Universitas Putera Batam;
2. Bapak Dr. Karol Teovani Lodan, S.AP., M.AP. selaku Ketua Program Studi Administrasi Negara;
3. Ibu Lubna Salsabilla, S.IP., M.I.P., M.PA. selaku Dosen Pembimbing skripsi penulis di Universitas Putera Batam;
4. Bapak Dr. Karol Teovani Lodan, S.AP., M.AP. Selaku Dosen Pembimbing Akademik Penulis di Universitas Putera Batam;
5. Segenap Dosen Jurusan Administrasi Negara yang telah memberikan ilmunya kepada penulis;
6. Segenap Dosen dan Staff Universitas Putera Batam;
7. Seluruh anggota serta Staff Dinas Lingkungan Hidup yang telah memberikan izin penelitiannya kepada peneliti;
8. Kepada kedua orang tua tercinta, Bapak Armansyah dan Ibu Sri Nani yang selalu memberikan semangat serta doanya yang tiada henti dipanjatkan kepada Allah SWT, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini;
9. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini secara langsung maupun tidak.

Dengan demikian penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah penulis sebutkan, dan apabila ada pihak belum sempat disebutkan maka penulis mohon maaf, besar harapan penulis atas Skripsi yang telah ditulis semoga bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan umumnya bagi pembaca.

Batam, 27 Januari 2023

Wiwiek Armayana

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
SURAT PERNYATAAN ORSINALITAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	ix
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	7
1.3 Batasan Masalah.....	7
1.4 Rumusan Masalah	7
1.5 Tujuan Penelitian	8
1.6 Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Konsep Teoritis	10
2.1.1 Pengertian Kebijakan Publik.....	10
2.1.2 Ciri-Ciri Kebijakan Publik.....	11
2.1.3 Tahapan Kebijakan Publik	12
2.1.4 Urutan Proses Pembuatan Kebijakan Publik	14
2.1.5 Proses Kebijakan Publik	15
2.2 Implementasi Kebijakan Publik	15
2.3 Evaluasi Kebijakan.....	16
2.3.1 Fungsi Evaluasi Kebijakan.....	16
2.3.2 Tipe Evaluasi Kebijakan	17
2.3.3 Dimensi Evaluasi Kebijakan	18
2.3.4 Indikator-Indikator Evaluasi Kebijakan.....	19
2.4 Pengelolaan Sampah	22
2.4.1 Jenis Dan Sifat Sampah.....	23
2.4.2 Metode Pengelolaan Sampah	24
2.5 Bank Sampah	24
2.5.1 Undang-Undang Mengenai Bank Sampah.....	25
2.6 Penelitian Terdahulu	26

2.7 Kerangka Pemikiran.....	30
BAB III METODE PENELITIAN	31
3.1 Jenis Penelitian.....	31
3.2 Sifat Penelitian	31
3.3 Lokasi Penelitian dan Periode Penelitian.....	32
3.4 Sumber Data.....	33
3.5 Metode Pengumpulan Data.....	33
3.6 Metode Analisis Data.....	34
3.7 Definisi Operasional Variabel Penelitian.....	35
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	37
4.1 Hasil Penelitian	37
4.1.1 Gambaran Umum Kota Batam.....	37
4.1.2 Gambaran Umum Bank Sampah Kota Batam	37
4.1.3 Visi Dan Misi Bank Sampah.....	39
4.1.4 Sarana Dan Prasarana Bank Sampah	39
4.1.5 Sruktur Organisasi Bank Sampah	39
4.1.6 Mekanisme Menjadi Nasabah Bank Sampah.....	40
4.1.7 Mekanisme Kerja Unit Bank Sampah.....	41
4.2 Pembahasan.....	42
4.2.1 Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Kota Batam Melalui Program Bank Sampah Batam	42
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	55
5.1 Simpulan	55
5.2 Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN.....	61
Lampiran I Pendukung Penelitian	
Lampiran II Daftar Riwayat Hidup	
Lampiran III Surat Keterangan Penelitian	

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.1 Capaian Kinerja Pengelolaan Sampah 2021	1
Gambar 1.2 Jumlah Bank Sampah Indonesia 2019-2022.....	3
Gambar 2.1 Tahapan Kebijakan Publik.....	12
Gambar 2.2 Kerangka Berpikir	30
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Bank Sampah.....	39

DAFTAR TABEL

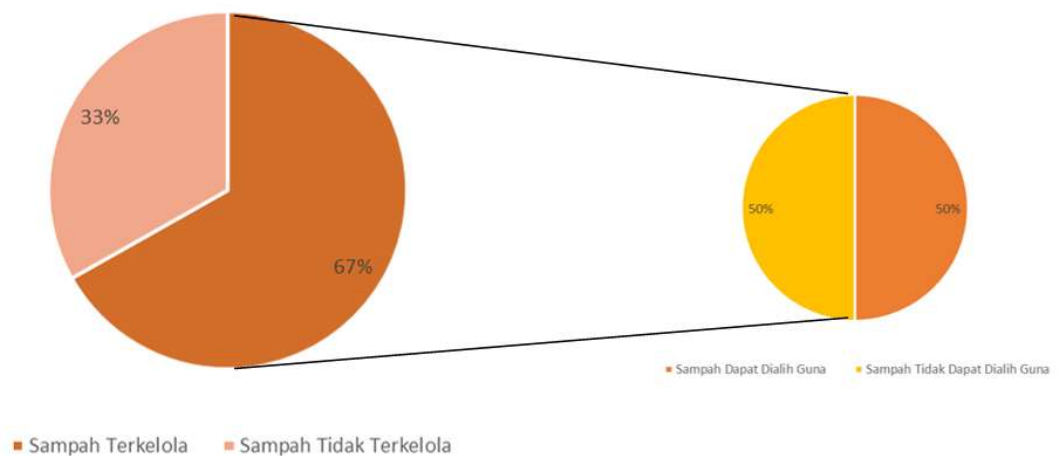
	Halaman
Tabel 1.1 Jumlah Timbulan Sampah Kota Batam.....	4
Tabel 1.2 Lokasi Bank Sampah Kota Batam.....	5
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	26
Tabel 3.1 Periode Penelitian.....	32
Tabel 3.2 Daftar Narasumber Penelitian	34
Tabel 4.1 Harga Pembelian Sampah Nasabah.....	41

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Permasalahan sampah di Indonesia merupakan salah satu permasalahan yang setiap tahunnya menjadi agenda yang tidak dapat di selesaikan oleh pemerintah. Berdasarkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Jendral pengelolaan sampah, setidaknya komposisi sampah di Indonesia berupa sampah Organik 57%, sampah Plastik 16%, sampah Kertas 10%, serta lainnya sebesar 17%. Kurang lebih 29,5% ton sampah per tahunnya menjadi permasalahan pelik bagi pemerintah Indonesia (Ikhsanul Kahfi, 2022).



Gambar 1.1 Capaian Kinerja Pengelolaan Sampah 2021

Sumber: KLHK 2021

Pada gambar 1 diatas menunjukkan bahwa sampah yang tidak dapat dikelola oleh pemerintah masih mencapai 33% pada tahun 2021, Pengelolaan sampah yang sudah dilakukan sebanyak 67% sedangkan sampah yang dapat dialih gunakan sebanyak 50% dan sampah yang tidak dapat dialih gunakan sebanyak 50%. Hal ini berarti pengurangan sampah tahunan Indonesia dari sampah, biogas, minyak dan lainnya jauh dari 100%.

Hal ini cukup memprihatinkan, apalagi pemerintah telah menetapkan target 30 persen sampah kantong plastik pada tahun 2025, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Sampah dan Sampah Rumah Tangga. Pengelolaan sampah sangat penting karena sejenis sampah plastik merupakan salah satu limbah yang berdampak negatif terhadap lingkungan dan membutuhkan waktu 1.000 tahun untuk terurai sepenuhnya (Republik Indonesia, Nomor 97 Tahun 2017).

Pengurangan sampah sebenarnya kini dapat dipelopori oleh masyarakat menggunakan bank sampah di lingkungannya. Definisi Bank Sampah menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup RI Nomor 13 Tahun 2012 adalah tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang yang memiliki nilai ekonomi. Di Indonesia bank sampahtelah tersebar di 30 provinsi (363 kabupaten/kota) dengan total 3.524 unit (Purwanto, 2019).



Gambar 1.2 Jumlah Bank Sampah di Indonesia 2019-2022

Sumber: KLHK 2022

Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, jumlah bank sampah di Indonesia pada tahun 2019 - 2021 mengalami kenaikan dan terjadi penurunan pada tahun 2022. Namun, meski meningkat dari tahun ke tahun, angka tersebut tentu tidak berpengaruh signifikan dibanding tonase sampah tahun sebelumnya. Dari data KLHK menunjukkan bahwa pada tahun 2019 jumlah Bank Sampah di Indonesia mencapai sebanyak 129.173.361.42 Ton, 2020 sebanyak 32.038.492.63 Ton, 2021 sebanyak 30.429.174.09 Ton, dan pada tahun 2022 mengalami penurunan mencapai 29.565.740.01 Ton.

Permasalahan serupa terjadi di kota Batam. Terhitung pada tahun 2020 bahwa jumlah laju pertumbuhan penduduk mencapai 2,32% per tahunnya. Peningkatan yang signifikan tersebut tentu saja beriringan dengan bertambahnya permasalahan jumlah produksi sampah, terutama sampah rumah tangga.

Tabel 1.1 Jumlah Timbulan Sampah Kota Batam 2019-2021

No	Tahun	Jumlah Sampah (kg)
1.	2019	294.267.090
2.	2020	289.174.030
3.	2021	290.271.000

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam 2021

Pada data yang diatas menunjukkan bahwa timbulan sampah Kota Batam yang paling banyak terdapat di tahun 2019. Jika jumlah penduduk sampah di Kota Batam mengalami pertumbuhan setiap tahunnya. Jika pengurangan sampah dengan 3R (Reduce, Reuse, Recycle) tidak dilakukan oleh masyarakat sendiri, masalah sampah yang ada saat ini akan tetap ada. Pengelolaan sampah dilakukan dengan berbagai teknik untuk memperkecil ukuran pada bobot sampah. Salah satu ketentuan yang tercakup dalam Undang-Undang Daerah Kota Batam No. 11 Tahun 2011 terkait dengan mengatur tentang retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di mana masyarakat mempunyai kewajiban untuk membayar kontribusi pelayanan kebersihan. Tampaknya, masalah ini berkaitan dengan kesejahteraan umum masyarakat dan diperparah dengan lemahnya peraturan pemerintah atau undang-undang tentang pembuangan sampah. Ketentuan yang mengatur penggunaan bank sampah untuk mendaur ulang, mengurangi, dan menggunakan kembali bahan juga berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 13 Tahun 2012. Namun mengingat belum ada program

yang secara konsisten mengimplementasikan aturan yang telah ditetapkan, muncul isu mulai dari kepedulian sosial, kesehatan, dan lingkungan (Malikah & Nurmayanti, 2021).

Bank Sampah yang saat ini beroperasi di 11 Kecamatan Kota Batam terdiri dari 135 Unit bank sampah dengan kapasitas terbatas untuk memproduksi sampah, atau hanya 30 ton per tahun pada tahun anggaran 2017. Pada pemilahan sampah tidak begitu menjadi perhatian sendiri disebabkan tempat sampah rumah tangga (sumber sampah) masih terdiri dari satu jenis tempat sampah saja. Oleh karena itu, sebagian besar waktu, sampah dari sumbernya kebanyakan belum terpilah. padahal sampah akhir-akhir ini dapat diolah menjadi kompos, energy, bahan bakar, dan lain-lain sebagainya.

Tabel 1.2 Lokasi Bank Sampah Kota Batam

No	Lokasi Bank Sampah	Jumlah Unit Bank Sampah
1.	Kec. Batu Aji	38
2.	Kec. Sagulung	32
3.	Kec. Sekupang	18
4.	Kec. Sei Beduk	10
5.	Kec. Lubuk Baja	2
6.	Kec. Batu Ampar	7
7.	Kec. Bengkong	10
8.	Kec. Batam Kota	15
9.	Kec. Bulang	1
10.	Kec. Belakang Padang	1
11.	Kec. Nongsa	1

Sumber: Bidang Kebersihan Kota Batam

Sejak berdirinya Bank Sampah di Batam sudah cukup memberikan kontribusi yang positif, namun perannya dalam pengendalian dan pengurangan sampah di Batam belum dirasakan secara maksimal. Anda masih bisa melihat tumpukan sampah berserakan di mana-mana di lubang, bazar, tanah kosong, dll (Jalil, 2019).

Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mahirah et al, (2022), Bank Sampah dinilai memiliki nilai ekonomi, terutama dalam peningkatan pendapatan masyarakat yang tergabung dalam Bank Sampah. Di sisi lain, dalam penelitiannya Mahirah et al, (2022) menjelaskan bahwa adanya Bank Sampah merupakan wujud dari penerapan program 3R. Sedangkan Dompok & Simarmata, (2014), menjelaskan bahwa alur “kumpul-angkut-buang” telah berhasil di ubah dengan adanya program Bank Sampah.

Hal ini akan menjadi acuan bagi peneliti untuk mengkaji ulang kebijakan pengelolaan sampah melalui Bank Sampah. Sejauh mana program ini berjalan dan seberapa efektifkah pengelolaan program ini dalam menurunkan produktivitas sampah dan apa yang menjadi kendala dalam mencapai program ini karena selama ini belum terlihat pamornya dan lebih tepat dikatakan demikian. sudah biasa-biasa saja. Saat ini sampah di Kota Batam sudah terkumpul. Jika pengelolaannya tidak diatur dengan baik, terutama dalam hal pengurangan sampah, maka bertambah rumit jika tidak di rencanakan dengan matang (Manalu & Purba, 2020).

Dalam penelitian ini yang akan dibahas adalah mengevaluasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Batam tahun 2022 yang dilaksanakan oleh Dinas

Lingkungan Hidup Bidang Pengelolaan Sampah Kota Batam melalui program Bank Sampah Batam. Maka dari itu peneliti mengangkat judul **“Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Kota Batam Melalui Program Bank Sampah Batam”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang sebelumnya, maka identifikasi masalah yang didapatkan yakni:

1. Program bank sampah di kota Batam belum mampu untuk mengurangi jumlah sampah yang tidak terkelola di kota Batam.
2. Kurangnya dukungan dari pihak lain untuk menghambat pelaksanaan bank sampah di kota Batam.

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi permasalahan di atas dan dikarenakan keterbatasan waktu, biaya, dan pembahasan penelitian ini tidak mengarah kemana-mana, maka penulis memfokuskan dan mengangkat metodologi penelitian dalam *“Evaluasi kebijakan pengelolaan sampah melalui program bank sampah The Gade Clean and Goald Unit Bank Sampah (UBS) Allium yang terletak di kelurahan Sungai Langkai, Kecamatan Sagulung, Kota Batam”*.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, pokok penelitian ini dilakukan terhadap Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Kota Batam Melalui Program Bank Sampah Batam. Dari pokok penelitian ini, kemudian peneliti menarik rumusan masalahnya

sebagai berikut:

1. Bagaimana manajemen pengelolaan bank sampah *The Gade Clean and Gold* Unit Bank Sampah (UBS) Allium di kecamatan Sagulung?
2. Apakah kebijakan pengelolaan sampah kota Batam melalui program bank sampah sudah berjalan dengan efektif?
3. Apakah faktor-faktor yang mendukung dan menghambat jalannya program bank sampah di kecamatan Sagulung?

1.5 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah sebelumnya, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui manajemen pengelolaan bank sampah *The Gade Clean and Gold* Unit Bank Sampah (UBS) Allium di kecamatan Sagulung.
2. Untuk mengetahui apakah kebijakan pengelolaan sampah kota Batam melalui program bank sampah sudah berjalan dengan efektif.
3. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mendukung dan menghambat jalannya program bank sampah di kecamatan Sagulung.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis, Diharapkan penelitian ini memberikan manfaat secara teoritis untuk penelitian di masa yang akan mendatang di bidang tersebut serta untuk kemajuan pengetahuan secara umum, khususnya di bidang Evaluasi kebijakan

pengelolaan sampah Kota Batam melalui program bank sampah Batam.

2. Secara Praktis, Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran atau masukan yang diberikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam dan bank sampah Allium Kecamatan Sagulung melalui adanya pemanfaatan bank sampah di Kota Batam.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Teoritis

2.1.1 Pengertian Kebijakan Publik

Thomas R. Dye (1992), menjelaskan bahwa kebijakan publik adalah Setiap tindakan, baik yang dilakukan maupun tidak, harus sejalan dengan beberapa prinsip dasar kebijakan yang harus diambil untuk memajukan kehidupan manusia bersama. Prinsip ini harus menyeluruh agar kebijakan itu bermanfaat bagi seluruh rakyat dan tidak menimbulkan masalah. Dalam situasi ini, pemerintah harus berhati-hati dalam menentukan keputusan (Suaib et al., 2022).

William N. Dunn (1999), menjelaskan kebijakan publik adalah alternatif yang saling berhubungan yang dibuat oleh pihak-pihak yang berkepentingan atau pejabat pemerintah mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan tanggung jawab pemerintah, yaitu keamanan, energi, pendidikan, bantuan sosial, bantuan pemerintah, bimbingan, kejahatan, kota, dan sebagainya (Harbani Pasolong, 2019).

Agustino (2020), mendefinisikan pengertian kebijakan publik sebagai suatu hubungan yang terjadi di antara unit pemerintah dengan lingkungannya. Banyak pihak yang beranggapan bahwa definisi tersebut terlalu luas. Terlebih untuk dipahami, sebab apa yang dimaksud dengan kebijakan publik bisa mencakup banyak hal.

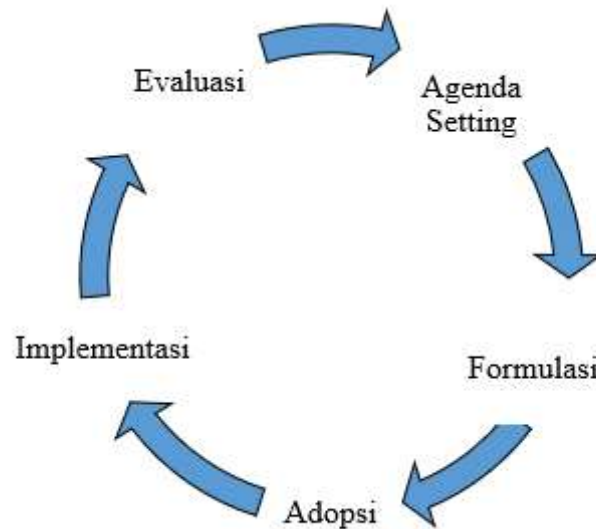
Dari beberapa pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah sesuatu yang dibicarakan sebelum diajukan kepada pemerintah sesuai dengan nilai-nilai bersama, seperti Undang-Undang, atau undang-undang lainnya dimana kebijakan publik yang dimaksud adalah dilaksanakan dengan maksud agar masyarakat umum dapat hidup dengan aman.

2.1.2 Ciri-Ciri Kebijakan Publik

Secara umum, kebijakan publik selalu menunjukkan karakteristik atau ciri tertentu dari berbagai kegiatan pemerintah. Anderson (dalam Sudiran, 2018) mengemukakan lima ciri umum dari kebijakan publik, yakni:

1. Setiap kebijakan memiliki tujuan. Kebijakan tidak dapat dibuat secara acak atau karena tidak cukup waktu guna membuatnya. Jika tidak terdapat tujuan yang perlu dicapai, tidak perlu membuat suatu kebijakan.
2. Sesuatu dalam kebijakan tidak dapat berdiri sendiri. Kebijakan juga memiliki keterkaitan dengan pedoman yang berbeda terhadap kebutuhan masyarakat luas dan didasarkan pada interpretasi dan penerapan hukum.
3. Kebijakan adalah apa yang sebenarnya dilakukan pemerintah, bukan apa yang diinginkan atau ingin dilakukannya.
4. Suatu kebijakan dapat berupa kebijakan negatif, larangan, atau berupa pengarahan untuk melaksanakannya.
5. Kebijakan didasarkan pada hukum. Karena hukum memiliki kekuatan untuk memaksa masyarakat untuk mematuhi.

2.1.3 Tahapan Kebijakan Publik



Gambar 2.1 Tahapan Kebijakan Publik (Widodo, 2021)

1. Tahap Penyusunan Agenda

Pada tahap ini, dalam penyusunan agenda merupakan tahapan yang paling tepat berkaitan dengan setiap kebijakan publik. Pada pembahasan ini berlangsung di tempat yang sesuai untuk membahas masalah dan kebutuhan publik. Jika suatu masalah dapat dihubungkan dan diberi status publik, mengharuskan tindakan publik, maka masalah tersebut berpotensi diperlakukan sebagai aset yang lebih berharga daripada masalah dengan masalah lainnya.

2. Tahap Formulasi Kebijakan

Pada tahap ini, masalah yang sudah ditambahkan dalam agenda kebijakan

akan dibahas oleh pembuat kebijakan. Pada kenyataannya, masalah tersebut akan menjadi satu-satunya pilihan yang layak di antara banyak alternatif yang tersedia untuk memecahkan masalah yang telah diidentifikasi. Pertemuan ini akan menghadapi beberapa masalah serius karena akan melibatkan sejumlah aktor dalam proses pertunjukan, sehingga sulit untuk menyelesaikan masalah apa pun jika tidak ada kompromi atau semangat kerja sama untuk menyelesaikan masalah yang muncul.

3. Tahap Adopsi/Legitimasi Kebijakan

Mengadopsi/legitimasi suatu kebijakan merupakan langkah selanjutnya setelah merumuskan suatu kebijakan yang bertujuan untuk memberikan umpan balik atau dukungan selama proses pengambilan keputusan pemerintah. Negara-negara yang bertikai akan berpartisipasi dalam arahan pemerintah jika tindakan legitimasi dalam masyarakat tertentu dianggap oleh masyarakat umum.

4. Tahap Implementasi Kebijakan

Pada tahap ini, program yang telah dikembangkan dan diterima sebagai alternatif dari masalah tersebut. Birokrasi di tingkat bawah kemudian ditugaskan untuk mengimplementasikan atau menegakkan program tersebut. Kepentingan akan berkonflik di titik yang berbeda, sehingga ada pihak yang mendukung pelaksanaannya dan pihak lain yang terkadang mengalami resistensi dari pemangku kepentingan yang beragam.

5. Tahap Penilaian Atau Evaluasi Kebijakan

Pada tahap terakhir ini, kebijakan yang diterapkan akan dianalisis atau dinilai untuk menentukan seberapa baik mereka dapat mengatasi masalah yang muncul. Dalam proses penilaian dan evaluasi, efek kebijakan akan seragam, oleh karena itu seperangkat metrik akan menjadi dasar evaluasi tersebut.

2.1.4 Urutan Proses Pembuatan Kebijakan Publik

Dalam proses terciptanya setiap perumusan kebijakan, selalu ada faktor-faktor tertentu yang paling penting dalam pembuatannya. Menurut Nugroho menegaskan bahwa pengelompokan berikut hadir dalam kebijakan publik dan signifikan dalam proses kebijakan publik yang meliputi:

1. Kepercayaan akan kebaikan, Kebijakan publik termasuk dalam arah dan penalaran yang dibangun dalam pencapaian kepentingan publik atau masyarakat. Setiap kebijakan pada dasarnya berguna untuk kebutuhan dasar. Oleh karena itu, setelah kebijakan itu dilaksanakan dan jelas manfaat serta tujuannya bagi rakyat, tingkat kebahagiaan rakyat akan meningkat.
2. Nilai-Nilai dan Norma, terlepas dari kualitas baik yang terkandung dalam kebijakan yang melanggar kode etik atau nilai-nilai moral, kebijakan juga memiliki nilai dan norma, apakah sesuai dengan norma yang ada atau tidak.
3. Proses politik dan hasil interaksi politik. Kebijakan yang sudah memasuki wacana politik baku akan mengembangkan perspektif bersama. Melaksanakan suatu pendekatan dalam kebijakan tertentu berarti memenuhi maksud, misi, dan tujuan kebijakan tersebut.

4. Institusional politik, Lembaga Pemerintahan adalah organisasi publik yang didirikan berdasarkan prinsip demokrasi. Proses kepemimpinan lembaga negara ditentukan oleh sistem politik negara.
5. Keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan yang mengarah pada keyakinan baru tentang kebaikan untuk memperkuat adanya kebijakan (Hayat, 2018).

2.1.5 Proses Kebijakan

Dunn mengungkapkan bahwa langkah yang diperlukan untuk mengatasi situasi suatu politik meliputi berbagai proses kebijakan yang meliputi: 1) Menetapkan agenda kebijakan, 2) Adopsi Kebijakan, 3) Implementasi Kebijakan, dan 4) Mengevaluasi kebijakan. Menurut Anderson, proses kebijakan publik meliputi langkah-langkah sebagai berikut: 1) Perumusan Masalah, 2) Formulasi Kebijakan, 3) Penentuan Kebijakan, 4) Implementasi Kebijakan, dan 5) Evaluasi Kebijakan. Sebaliknya, menurut AG. Subarsono, proses kebijakan publik merupakan kegiatan intelektual yang dilakukan sebagai proses kegiatan organisasi yang bersifat politis (Harbani Pasolong, 2019).

2.2 Implementasi Kebijakan Publik

Konsep implementasi kebijakan publik menurut Grindle (1980) mengatakan bahwa implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan. Program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan disalurkan untuk mencapai sasaran (Andani et al., 2019).

Mazmanian dan Sabatier (1983) menjelaskan hakikat implementasi kebijakan (dalam TALIB & MARS, 2022) adalah memahami hal-hal yang seharusnya terjadi setelah suatu program yang dinyatakan berlaku atau dirumuskan. Selanjutnya pendapat Gross dkk, Mereka menekankan pentingnya partisipasi implementor dalam proses penciptaan kebijakan publik, meliputi:

1. Partisipasi akan mengangkat jiwa para staf yang dibutuhkan dalam siklus implementasi.
2. Partisipasi akan meningkatkan tanggung jawab yang diharapkan untuk mencapai suatu perubahan.
3. Partisipasi akan secara jelas mengungkapkan tujuan dan prinsip yang dimaksudkan untuk dipahami oleh para implementor.
4. Partisipasi akan mengurangi tingkat intensitas pada para pelaksana.

2.3 Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan merupakan suatu keadaan yang mendesak dalam kebijakan pemerintah, karena untuk mengukur pelaksanaan suatu kebijakan pemerintah, apakah sudah tercapai dan sesuai dengan harapan atau masih banyak permasalahan bagi kelompok. diri. Di sisi lain, sebagian besar kebijakan pemerintah yang telah diberikan oleh pemerintah tidak memberikan efek yang berdampak signifikan bagi masyarakat umum atau kelompok masyarakat tertentu (Hayat, 2018).

2.3.1 Fungsi Evaluasi Kebijakan

Beberapa arti penting dalam analisis kebijakan dan evaluasi. Menurut Samodra Wibawa (1993), menjabarkan bahwa evaluasi kebijakan publik memiliki empat fungsi, meliputi:

1. Eksplanasi, Evaluasi yang juga memungkinkan untuk memotret realitas pelaksanaan program, dapat digunakan untuk menghasilkan generalisasi tentang pola hubungan antara berbagai karakteristik realitas yang direalisasikan;
2. Kepatuhan, melalui evaluasi dapat diketahui apakah kegiatan birokrasi dan aktor lain yang mirip dengan norma dan pedoman yang dikemukakan oleh suatu kebijakan itu sendiri;
3. Audit, melalui evaluasi dapat diketahui apakah kelompok sasaran kebijakan benar-benar menerima keluaran, atau jika ada terjadi kebocoran atau penyimpangan;
4. Akunting, dengan melalui evaluasi dampak sosial ekonomi kebijakan tersebut dapat dilihat. (Hayat, 2018).

2.3.2 Tipe Evaluasi Kebijakan

Menurut Langbein (dalam Hayat, 2018) tipe evaluasi kebijakan terbagi menjadi dua macam, yakni:

1. Tipe evaluasi hasil (*outcomes of public implementation*) yang Penelitian ini didasarkan pada tujuan kebijakan. Ukuran efektivitas kebijakan berkaitan

dengan sejauh mana tujuan program tercapai;

2. Tipe evaluasi proses (*process of public policy implementation*) yaitu penelitian evaluasi berdasarkan pedoman pelaksanaan (Juklak) dan pedoman teknis (Juknis). Ukuran efektivitas suatu kebijakan adalah efisiensi dimana kebijakan tersebut dilaksanakan dengan pedoman yang telah ditetapkan.

2.3.3 Dimensi Evaluasi Kebijakan Publik

Palumbo mengatakan, dimensi kajian dalam kajian evaluasi mencakup keseluruhan siklus dan proses kebijakan, mulai dari penyusunan kebijakan hingga implementasi. (Situmorang & Santoso, 2021). Menurut penjelasan diatas Palumbo menyimpulkan bahwa kajian dalam studi evaluasi kebijakan meliputi dimensi-dimensi sebagai berikut:

Palumbo menyatakan bahwa kriteria penilaian kajian tersebut mempertimbangkan setiap aturan dan langkah proses kebijakan, sejak rancangan pertama kali diajukan hingga saat benar-benar dipraktikkan (Situmorang & Santoso, 2021). Menurut informasi yang diberikan, Palumbo menekankan bahwa kajian dalam studi evaluasi kebijakan meliputi dimensi-dimensi yang meliputi:

1. Evaluasi Proses

Saat melaksanakan evaluasi, aturan harus dibuat dan diuji dua kali sebelum diterapkan.

2. Evaluasi Desain Kebijakan

Pada tahap ini, dimana pilihan yang paling sedikit ditentukan dengan

menimbang biaya dan tujuan, (*cost-benefit analysis*).

3. Evaluasi Legitimasi Kebijakan

Mengevaluasi seberapa mudah diaksesnya suatu aturan bagi masyarakat (stakeholder) atau audiens yang dituju oleh kebijakan tersebut.

4. Evaluasi Sumiatif

Tahapan dimana diberlakukan setelah peraturan diikuti dan diberlakukan. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi efisiensi kebijakan atau program serta dampak langsungnya terhadap pemecahan permasalahan.

5. Evaluasi Formatif

Evaluasi formatif merupakan Prosedur yang dilakukan pada tahap implementasi kebijakan. Maksudnya evaluasi formatif yang mungkin menyarankan peningkatan atau menyoroti kekurangan dari suatu program yang telah dilakukan dengan maksud untuk menghasilkan perubahan perilaku yang lebih bermanfaat.

2.3.4 Indikator-Indikator Evaluasi Kebijakan Publik

Menurut William N. Dunn (dalam WOWILING et al., 2018), Indikator-indikator kebijakan yang harus dievaluasi adalah sebagaimana berikut:

1. Efektivitas

Efektivitas adalah kemampuan untuk mencapai keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Efektivitas kadang-kadang disebut sebagai hasil yang berharga. Efisien terkait dengan tugas yang diselesaikan

dengan hasil yang diinginkan. Berkaitan erat terhadap unit layanan atau nilai keuangan, kebijakan publik strategi berjalan secara benar dengan hasil yang telah ditetapkan, dan juga menunjukkan sejauh mana kebijakan publik strategi berjalan secara benar dengan hasil yang telah ditetapkan

2. Efisien

Efisien adalah seberapa banyak upaya yang dibangun dengan mempertimbangkan efisiensi untuk mencapai tingkat efektivitas yang diinginkan. Kebijakan dapat dikatakan sebagai pencapaian hasil terbaik dengan biaya yang paling sedikit, atau efisiensi. Tujuan kebijakan publik sangat signifikan, dan harga yang dihasilkan sangat mahal dibandingkan dengan jumlah orang yang akan menggunakannya. Selain itu, inisiatif kebijakan tidak dilakukan secara tepat waktu.

3. Kecukupan

Kecukupan dalam kebijakan publik adalah situasi tertentu yang harus ditangani dengan hati-hati dengan segala cara untuk menyelesaikan masalah apa pun yang dihadapi saat menghadapinya. Menurut prinsip di atas, dapat dikatakan bahwa efektivitas cukup terutama ditunjukkan dengan menghindari atau mengasumsikan bahwa metode alternatif akan dapat memenuhi kebutuhan cukup dalam hal uang, sumber daya, atau waktu yang tersedia untuk mengatasi masalah yang muncul.

4. Perataan

Perataan dalam kebijakan publik berarti dengan pemerataan yang diberikan

dan diperoleh sasaran kebijakan publik. Menurut William Dunn, karakteristik ekuitas yang menentukan adalah pendirian yang tegas, sosial, dan berfokus pada pengukuran hasil dan mempertahankan dan tidak membahayakan dirinya sendiri. Kebijakan hadir dalam hasil atau hasil yang akurat. Suatu program bisa lamban dan tidak menguntungkan jika manfaat dan biayanya sama. Kesetaraan dan kewajaran adalah kunci dari perataan.

5. Responsivitas

Responsivitas dalam sebuah kebijakan publik adalah sebuah tindakan berupa tanggapan terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan. Hal tersebut merujuk pada tanggapan kebijakan publik terhadap pelaksanaan kebijakan. Kebutuhan individu, cita-cita masyarakat, dan prioritas semuanya dapat dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Reaksi publik terhadap implementasi yang meramalkan konsekuensi yang akan terjadi ketika suatu kebijakan diberlakukan, serta reaksi publik terhadap efek samping kebijakan yang mulai dirasakan akan digunakan untuk menentukan apakah kebijakan itu berhasil atau tidak.

6. Ketepatan

Ketepatan mengacu pada nilai atau biaya dari tujuan program dan kekuatan opini berdasarkan tujuan tersebut. Ketepatan adalah ukuran yang digunakan untuk memutuskan bahan mana yang akan digunakan dengan menilai apakah efek samping dari opsi yang diberikan merupakan solusi yang layak dan objektif. Dikarenakan aturan ini ditetapkan memiliki suatu zat. Seperti, efek

lain sebelumnya tidak dapat diprediksi dari positif ataupun negatif, hingga dapat dibayangkan bahwa opsi lain dianggap lebih baik daripada implementasi kebijakan, sehingga pendekatannya lebih kuat.

2.4 Pengelolaan Sampah

Konsep pengelolaan sampah terdiri dari 3 R (*reduce, reuse, recycle*) sebelum dimusnahkan atau dibuang. Menurut Cunningham (dalam HAJAR, 2022) yaitu *reduce* (mengurangi) atau melakukan pengurangan barang atau bahan yang digunakan. *Reuse* (menggunakan kembali) atau menggunakan kembali barang-barang yang masih bisa berfungsi. *Recycle* (mendaur ulang sampah) atau mendaur ulang sampah yang dapat didaur ulang kembali.

Menurut Kementerian Lingkungan Hidup, pengelolaan sampah adalah proses terencana dan berkelanjutan yang meliputi penanganan dan pengurangan sampah. Pengelolaan sampah adalah semua kegiatan yang dilakukan untuk menangani sampah sejak ditimbulkan sampai dengan pembuangan akhir (Dewanti et al., 2020).

Di dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah pasal 1, sampah merupakan sisa-sisa hasil dari aktivitas manusia sehari-hari atau hasil dari proses alam.

Selanjutnya menurut Deasy, (2020) dalam jurnalnya yang berjudul Peran Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Samarinda Dalam Pengelolaan Sampah Di Kota Samarinda Bahwa. “Sampah secara umum dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu sampah organik (sampah basah) dan sampah anorganik (sampah kering). Sampah

organik merupakan mayoritas sampah rumah tangga, termasuk sisa makanan dari dapur, sisa sayuran, dan sisa kulit buah. Sedangkan sampah anorganik berasal dari sumber daya alam yang tidak dapat di perbaharui seperti mineral dan minyak bumi”.

Rambe, (2021) mengatakan bahwa sistem pengelolaan sampah adalah suatu kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Sistem pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud, sebagai berikut:

1. Pengelolaan Sampah;
2. Teknis Pengelolaan Sampah;
3. Etika Kebersihan Lingkungan.

2.4.1 Jenis Dan Sifat Sampah

Dalam pengelolaan sampah perlu diperhatikan jenis dan sifat sampah (ASHAR, 2019). Kategori sampah yang dimaksud terdiri dari, sebagai berikut:

1. *Organic* (Sampah Basah), merupakan sampah yang susunnya terbuat dari bahan yang mudah membusuk.
2. *Anorganic* (Sampah Kering), merupakan jenis limbah yang mengacu pada sampah yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan yang sulit diuraikan.

2.4.2 Metode Pengelolaan Sampah

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, Fajriya, (2020) mengungkapkan bahwa pengelolaan sampah itu meliputi pendekatan *reduse*, *reuse*, dan *recycle* atau sering dikenal dengan 3R, yakni:

1. Pendekatan *reduse*, yaitu pendekatan dengan cara meminimalisir penggunaan barang yang kita gunakan.
2. Pendekatan *reuse*, yaitu Pendekatan dengan cara sebisa mungkin untuk menghindari pemakaian barang sekali pakai untuk memperpanjang jangka waktu barang tersebut sebelum menjadi sampah.
3. Pendekatan *recycle*, yaitu pendekatan dengan cara melakukan daur ulang dari barang-barang yang sudah tidak terpakai lagi.

2.5 Bank Sampah

Bank sampah merupakan sebagai tempat penyimpanan berbagai jenis sampah. Sampah yang masih mempunyai nilai ekonomis adalah sampah yang disimpan di bank sampah. Bank sampah seringkali beroperasi dengan cara yang mirip dengan bank lain, dengan klien, akuntansi, dan administrasi. Sebaliknya, bank sampah menerima sampah yang masih bernilai ekonomis sementara prosesnya dikelola oleh pengelola bank sampah. Ini tidak seperti bank lain di mana kita biasanya tahu bahwa konsumen menyetor uang. Untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, sampah harus bersifat inventif, kreatif dan berwirausaha. Masyarakat diberi penghargaan untuk memilah dan

menyimpan sampah dalam jumlah tertentu di bawah sistem berbasis bank sampah untuk mengelola sampah rumah tangga.

2.5.1 Undang-Undang Mengenai Bank Sampah

Pada tanggal 15 Oktober 2012, Pemerintah Republik Indonesia, memberlakukan Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2012 Tentang pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, yang merupakan bagian dari Peraturan pelaksana dari Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 Tentang pengelolaan Sampah serta menetapkan aturan dasar hukum untuk penyelenggaraan pengelolaan sampah di Indonesia.

Pengelolaan sampah telah disosialisasikan, seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Kebijakan pengelolaan sampah yang selama lebih dari 30 tahun hanya mengandalkan konsep *end-of-pipe* dengan mengandalkan keberadaan tempat pembuangan akhir, telah berubah menjadi pendekatan *source reduction and resource management* melalui penerapan 3R. Oleh karena itu, seluruh lapisan masyarakat diharapkan mengubah pemikirannya dan memperlakukan sampah sebagai sumber daya alternatif, menjadikannya dapat digunakan kembali sebanyak mungkin secara langsung, melalui daur ulang atau proses lainnya (Pratama & Yusri, 2018).

Lima tahapan penanganan yaitu berupa pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah yang dilakukan oleh

seluruh lapisan masyarakat secara bertahap dan terencana, serta didasarkan pada kebijakan dan strategi yang jelas (Iftitah & Musta'in, 2018).

2.6 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

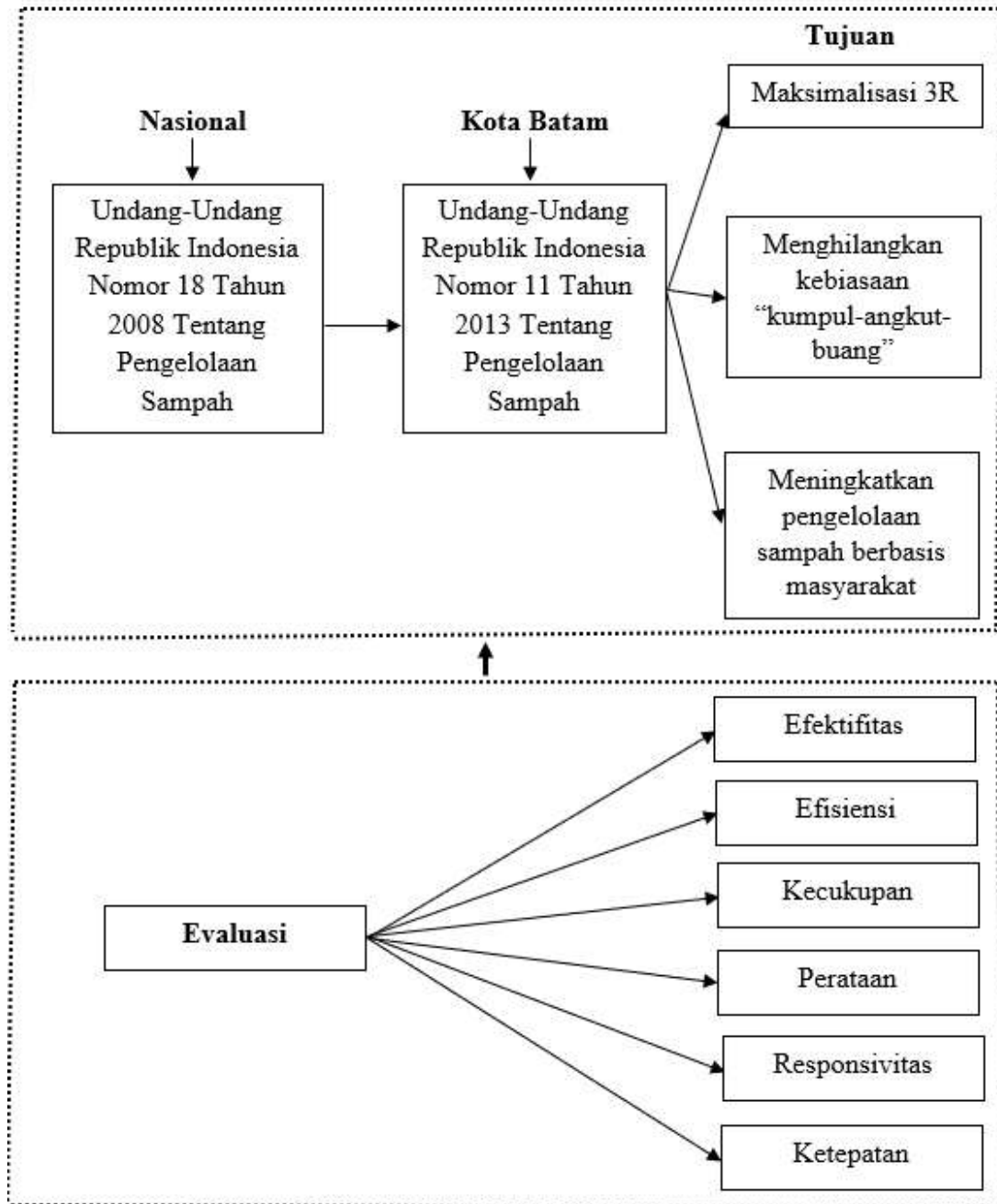
No	Nama Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Metode	Hasil Penelitian
1.	Kiki Hardiyanti (2020).	Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Demak.	Deskriptif Kualitatif.	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan pengelolaan sampah yang dilakukan di kabupaten Demak melalui Dinas Lingkungan Hidup belum optimal khususnya pengelolaan sampah yang dilakukan di TPA Kalikondang.
2.	Mike Dewanti, Eko Priyo Purnomo, dan Lubna Salsabila (2020).	Analisa Efektivitas Bank Sampah Sebagai Alternatif Pengelolaan Sampah Dalam Mencapai <i>Smart City</i> Di Kabupaten Kulon Progo.	Deskriptif Kualitatif.	<ul style="list-style-type: none"> • Dengan jumlah bank sampah sebanyak 116 per tahun 2019, keberadaan bank sampah berjalan dengan baik. • Karena bank sampah hanya mampu menangani 10% dari sampah yang dihasilkan, efektivitasnya selama ini dinilai masih rendah.
3.	Hazairin Thamrin, Iswan Dunggio, dan Sukirman Rahim (2022).	Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kota Gorontalo.	Penelitian Kualitatif	<ul style="list-style-type: none"> • Dalam hal pengelolaan sampah, tingkat ketanggapan masyarakat terhadap kebijakan cukup tinggi. • Untuk proyek besar pengangkutan sampah di Kota Gorontalo termasuk

No	Nama Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Metode	Hasil Penelitian
				<p>dalam kategori sedang. Namun, ada tingkat dukungan yang relatif tinggi untuk pengangkutan sampah.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kinerja pegawai persampahan tergolong rendah, dalam Kebijakan pendanaan pengelolaan sampah Kota Gorontalo termasuk dalam kategori sedang, karena rendahnya tingkat pendidikan dan rendahnya kemampuan masyarakat.
4.	Ira Patriani (2019).	Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Tempat Pembuangan Akhir Kelurahan Batu Layang Kecamatan Pontianak Utara.	Eksploratif Kualitatif.	<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan sampah tersebut tidak dilakukan sesuai dengan undang-undang dan tidak memenuhi kriteria efektifitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, dan responsivitas. • Volume sampah yang masuk ke TPA tidak tertangani dengan baik, yang disebabkan oleh berbagai faktor antara lain anggaran yang tersedia untuk

No	Nama Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Metode	Hasil Penelitian
5.	Lia Muliawaty, R. Taqwaty Firdausjah, dan Williya Achmad (2022).	Implementation of Waste Management Policies by the Main Waste Bank in Realizing the Effectiveness of the waste program in the city of Bandung.	Deskriptif Kualitatif	<ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan pengelolaan sampah strategi implementasi kebijakan berdasarkan efektivitas Program Bank Sampah di Kota Bandung.
6.	Frencilyka Manalu dan Tiurniari Purba (2020).	Analisis Kebijakan Pengelolaan Sampah Melalui Program Bank Sampah Kota Batam.	Pendekatan Kualitatif.	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat 196 Unit bank sampah yang dihasilkan oleh layanan lingkungan dan satu unit TPS 3R, namun hampir semuanya sudah tidak beroperasi lagi karena rendahnya minat masyarakat terhadap bank sampah. Hal ini dapat membuat program bank sampah menjadi kurang efektif karena banyak masyarakat yang tidak mengetahuinya akibat sosialisasi yang kurang baik.
7.	Nahda Mahirah, Edison Edison, dan Okparizan (2022).	Analisis Kemitraan Pengelolaan Sampah Melalui Bank Sampah Menuju Zero	Deskriptif Kualitatif.	<ul style="list-style-type: none"> • Prinsip transparansi dalam pengelolaan bank sampah telah terbangun, namun belum berjalan secara optimal.

No	Nama Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Metode	Hasil Penelitian
				<ul style="list-style-type: none"> • Ada tantangan dalam mengedukasi penduduk setempat tentang bank sampah, dan keterlibatan nasabah saat ini cukup rendah. • Kurangnya partisipasi masyarakat dan sarana prasarana yang terbatas.
8.	Anisa Putri Triana dan Emenda Sembiring (2019).	Evaluasi Kinerja Dan Keberlanjutan Program Bank Sampah Sebagai Salah Satu Pendekatan Dalam Pengelolaan Sampah Dengan Konsep 3R.	Deskriptif Kualitatif.	<ul style="list-style-type: none"> • Bank sampah unit program berada pada posisi yang baik, namun masih ada beberapa penyesuaian yang perlu dilakukan sebelum dapat digunakan di masa mendatang untuk melanjutkan program dan meningkatkan kinerja bank sampah unit.

2.7 Kerangka Berpikir



Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Berdasarkan tujuannya, penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Sudaryono, (2017) penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berupaya menganalisis kehidupan sosial dengan menggambarkan dunia sosial dari sudut pandang atau interpretasi individu (informan) dalam latar alamiah. Dikarenakan tingkat kealamian lokasi penelitian, maka penelitian ini merupakan metode survey, dimana metode ini digunakan untuk memperoleh data dari beberapa tempat nyata (bukan buatan), mengumpulkan data, wawancara terstruktur dan aktualisasi. Metode ini akan memungkinkan peneliti menganalisis informasi yang diperoleh di lapangan untuk menjadi unit penelitian yang berkualitas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran penilaian Program Bank Sampah Batam terhadap kebijakan pengelolaan sampah Kota Batam.

3.2 Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, dimana peneliti dapat mengkarakterisasi permasalahan yang diteliti, peneliti mengumpulkan bahan penelitian dengan cara melakukan turun ke lapangan dan melakukan observasi langsung serta wawancara dengan informan dari Dinas Lingkungan Hidup dan pengurus Bank Sampah Allium. Temuan data yang dikumpulkan didasarkan pada data sekunder dari buku, makalah

yang relevan dengan topik penelitian, dan studi sebelumnya, serta data primer dari kerja lapangan dan wawancara.

3.3 Lokasi Penelitian dan Periode Penelitian

1. Penelitian ini dilakukan pada Dinas Lingkungan Hidup Jl. Ir Sutami, Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau dan Unit Bank Sampah (UBS) Allium yang berlokasi di Griya batu Aji tahap 4 no 5, kelurahan sungai Langkai Kecamatan Sagulung, Kota Batam, Kepulauan Riau.
2. Periode Penelitian

Tabel 3.1 Tabel Periode Penelitian

No	Kegiatan	Bulan				
		September 2022	Oktober 2022	November 2022	Desember 2022	Januari 2022
1	Studi Pustaka					
2	Penyusunan Proposal					
3	Pengumpulan Data					
4	Pengolahan Data					
5	Analisis Hasil Penelitian					
6	Penyusunan Laporan					
7	Penyerahan Laporan					
8	Sidang Hasil					

3.4 Sumber Data

Penulis menggunakan sumber data yang digunakan sebagai berikut:

1. Data primer

yaitu data yang di peroleh dari hasil wawancara yang dilakukan penulis yaitu wawancara dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Bank Sampah.

2. Data sekunder

yaitu data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung yang dapat digunakan sebagai referensi penelitian ini yaitu buku, jurnal penelitian terdahulu dan website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 Direktorat Penanganan Sampah.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi yaitu melakukan pengamatan langsung ke lokasi penelitian. Observasi dilakukan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Bank Sampah sehingga penulis dapat mengetahui secara detail mengenai kebijakan pengelolaan sampah di kota Batam khususnya pengelolaan melalui Bank Sampah.

2. Wawancara

Wawancara yaitu kegiatan tanya jawab yang dilakukukan oleh peneliti kepada *stakeholder* dari Dinas Lingkungan Hidup dan Bank Sampah agar peneliti mendapatkan informasi yang valid.

Tabel 3.2 Daftar Narasumber Penelitian

No	Nama Narasumber	Jabatan
1.	Rida Meliyana	Kasi Pengurangan Sampah
2.	Topik	Staf Administrasi
3.	Huri	Pengamanan TPA
4.	Tina	Bendahara Bank Sampah
5.	Evi	Masyarakat

3. Dokumentasi

Dokumentasi yang dilakukan peneliti yaitu dengan melakukan perekaman suara dan pengambil foto agar memperkuat fakta data yang terjadi dilapangan.

3.6 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan pada peneliti yaitu menggunakan:

1. *Data Collection* (pengumpulan data)

Pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi semuanya dilakukan untuk memperoleh informasi.

2. *Data Reduction* (reduksi data)

Menurut (Rijali, 2019) reduksi data merupakan upaya menyimpulkan data, kemudian memilah-milah data dalam satuan konsep tertentu, kategori tertentu, dan tema tertentu. Oleh karena itu peneliti memilah data yang telah di dapat baik data dari informan, buku maupun penelitian terdahulu agar lebih ringkas dan jelas untuk memudahkan pemaparan dan penegasan pada kesimpulan.

3. *Data Display* (penyajian data)

Setelah data direduksi, kemudian penyajian data dilakukan sehingga peneliti memberikan deskripsi atau uraian.

4. *Conclusion Drawing/Verification* (penarikan kesimpulan/verifikasi)

Pada tahap akhir penelitian, peneliti melakukan penarikan kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan.

3.7 Definisi Operasional Variabel Penelitian

Menurut Sugiyono (dalam Ulfa, 2021) definisi operasional variable penelitian adalah batasan dan cara pengukuran variabel yang akan diteliti. Untuk menghindari pemahaman yang berbeda tentang konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini, maka dikemukakan konsep sebagai berikut:

1. Kebijakan publik adalah cara bertindak dan kemudian diputuskan oleh pemerintah untuk kepentingan umum, seperti undang-undang atau peraturan lain yang menetapkan serta harapan dan tujuan untuk memungkinkan masyarakat hidup sejahtera.
2. Implementasi kebijakan publik adalah proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan. Program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan disalurkan untuk mencapai sasaran.
3. Evaluasi kebijakan publik adalah suatu tahap yang sangat urgent dalam kebijakan publik, disebabkan untuk mengukur implementasi dari suatu kebijakan publik

tersebut, apakah sudah tercapai dan sesuai dengan harapan atau masih menimbulkan banyak masalah pada *target group* itu sendiri.

4. Pengelolaan sampah adalah suatu kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
5. Bank sampah merupakan salah satu tempat berlangsungnya proses pelayanan berkaitan dengan penabung sampah yang dilaksanakan oleh *teller* bank sampah. Ruangan sampah dibagi menjadi tiga bagian, masing-masing menyimpan sampah yang karakteristiknya berbeda-beda hingga akhirnya diambil oleh pengepul.